TAHUN
2017

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Sagan III/4 Yogyakarta 55223

Telp (0274)512386 Faks (0274)560386

www.dislautkan.jogjaprov.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan DIY disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2017, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memuat informasi capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY sehingga dapat diperoleh gambaran tentang hasil pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilakukan.

Diharapkan penyajian LKj IP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dengan tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 28 Februari 2018

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKAAN DIY

Ir. Bayu Mukti Sasongka, M.Si

NIP. 19641103 199102 1 001

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan DIY ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2012-2017. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang dihasilkan di tahun 2017, dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Sasaran 1: Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor perikanan dengan indikatornya PDRB sektor perikanan (juta rupiah). Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2017 adalah 464.867,1 atau 116,22% dari targetnya.

b. Sasaran 2: Meningkatnya konservasi dan pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan indikatornya Rasio luas kawasan lindung perairan (%). Caaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2017 adalah 1,42 atau 835,29% dari targetnya

Di luar IKU, pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY juga ditunjukkan oleh target pencapaian kinerja dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, berupa Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) dengan capaian 98,82% dari targetnya dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dengan capaian 106,07% dari targetnya serta Nilai Kinerja Anggaran dengan capaian 112,50% dari targetnya.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY ke depan. Yaitu pada tindak lanjut peningkatan status kawasan konservasi serta pengelolaan kawasan konservasi di masa yang akan datang terkait dengan adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ii
IKHTISAR EKSEKUTIF..... iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL.....v
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I PENDAHULUAN 1
I.1 Struktur Organisasi ..... dst
I.2 Fungsi dan Tugas
I.3 Keadaan Pegawai
I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana
I.5 Keuangan
I.6 Sistematika LKj IP
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
II.1 Perencanaan Strategis
II.1.1 Visi dan Misi
II.1.2 Tujuan dan Sasaran
II.1.3 Strategi
II.1.3.1 Misi 1
II.1.3.2 Misi 2
II.1.3.3 dan seterusnya....
II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017
II.3 Rencana Anggaran Tahun 2017
II.3.1 Target Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
II.4 Instrumen Pendukung
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
III.1. Capaian Kinerja Tahun 2017
III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
III.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya
III.4. Akuntabilitas Anggaran
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN- LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan DIY .....
Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017.....
Tabel II.3 Target Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2017 .....
Tabel II.4 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis.....
Dst .....

BAB 1

Pendahuluan

Bab 1 Berisi :

1. *Struktur Organisasi*
2. *Fungsi dan Tugas*
3. *Keadaan Pegawai*
4. *Keadaan Sarana dan Prasarana*
5. *Keuangan*
6. *Sistematika LKj IP*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2017 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
2. Mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan DIY di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan DIY di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

I.1 Struktur Organisasi

Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dinas Kelautan dan Perikanan DIY merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

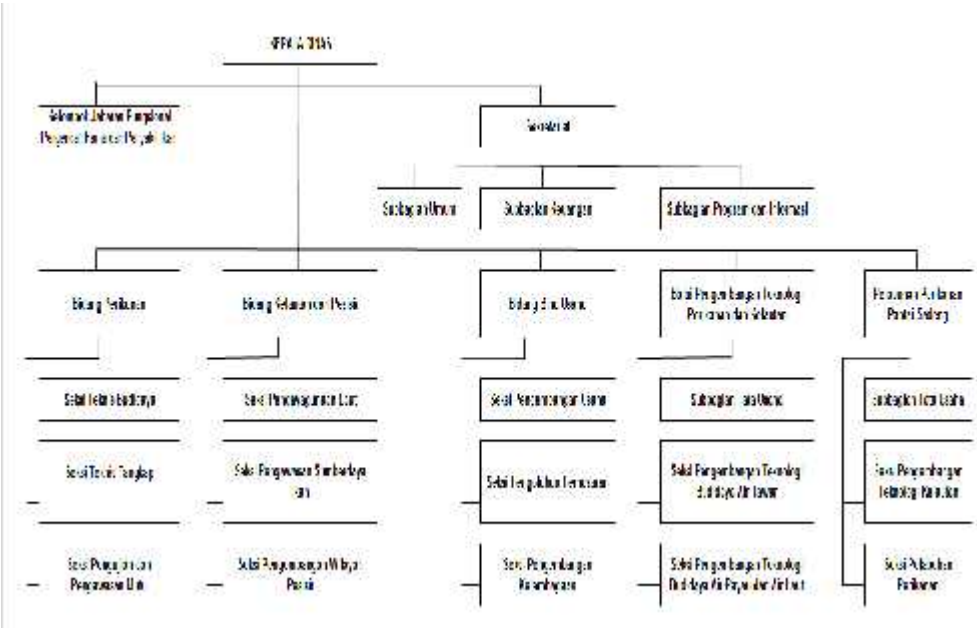

Gambar I.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

I.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 17 Juni 2015 menetapkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kelautan dan perikanan, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Kelautan dan Perikanan DIY mempunyai fungsi :

a) penyusunan program kerja ;
b) perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
c) pelaksanaan, pengembangan, pengolahan dan pemasaran kelautan dan
d) perikanan, wilayah pesisir;
e) pengujian dan pengawasan mutu perikanan;
f) pemberian fasilitasi penyelenggaraan di bidang kelautan dan perikanan Kabupaten/Kota;
g) pelaksanaan pelayanan umum sesuai kewenangannya;
h) penyelenggaraan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan lintas kabupaten/kota;
i) pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan,adat istiadat dan tradisi luhur bidang kelautan dan perikanan;
j) pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan;
k) pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
l) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

I.3 Keadaan Pegawai

Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan DIY berjumlah 129 orang, dengan rincian pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan sejumlah 65 orang, pegawai UPTD Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya (BPTPB) sejumlah 46 orang dan pegawai UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng sejumlah 18 orang. Rincian jumlah pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

INSTANSI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Dinas Kelautan dan Perikanan	36	29	65
BPTPB	41	5	46
PPP Sadeng	18	0	18
Jumlah	**95**	**34**	**129**

Sumber: Dislautkan DIY, 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan DIY didominasi oleh laki-laki dengan persentase sebesar 73,64%. Jumlah pegawai pada dinas induk mencapai 50,39% sedangkan jumlah pegawai pada UPTD BPTKP Cangkringan mencapai 35,66% dan PPP Sadeng sebesar 13,95%.

Proporsi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Gambar I.2 Proporsi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan DIY sebagian besar berpendidikan SLTA/sederajat dengan jumlah sebanyak 38 orang atau 29,46%.. Disusul dengan tingkat pendidikan S.1 sebanyak 34 orang atau 26,36%. Tingkat pendidikan paling tinggi adalah S.3 atau doktoral sejumlah 1

orang. Sedangkan tingkat pendidikan paling rendah adalah SD atau pendidikan dasar sejumlah 13 orang.

Keadaan pegawai berdasarkan pangkat dan golongan didominasi oleh golongan III/b dengan pangkat Penata Muda sebanyak 24 orang atau 18.60%. Kemudian disusul dengan golonngan II/c dengan pangkat Pengatur sebanyak 19 orang atau 14,73%. Golongan tertinggi di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY adalah golongan IV/b atau Pembina Tingkat I sebanyak 3 orang dan golongan terendah adalah golongan I/b atau Juru Muda Tingkat I sejumlah 8 orang. Secara rinci keadaan pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan disajikan sebagai berikut:

Gambar I.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Sedangkan jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerjaan berdasarkan Peraturan Gubenur DIY No 1 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubenur DIY No 66 Tahun 2008, Peraturan Gubenur DIY No 2 tahun 2012 tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan Peraturan Gubenur DIY No 3 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubenur DIY No 68 tahun 2008 tentang jenis dan kebutuhan JFT DIY adalah sebagai berikut:

1) Dinas Kelautan dan Perikanan DIY formasi 160 orang baru terisi 65 orang atau baru terisi 40,63%.

2) Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya (BPTPB) formasi 100 orang terisi 46 orang atau baru terisi 46,00%.

3) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng formasi 58 orang terisi 18 orang atau baru terisi 31,03%.

I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana aparatur di Dinas kelautan dan Perikanan DIY telah cukup untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Selengkapnya mengenai kondisi riil sarana dan prasarana aparatur dibandingkan dengan kondisi idealnya diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel I.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Nama Barang	Kondisi Riil	Kondisi Ideal
1	Kursi Eselon II	1	1
2	Kursi Eselon III	4	4
3	Kursi Eselon IV	12	12
4	Kursi Staf	45	100
5	Meja Eselon II	1	1
6	Meja Eselon III	4	4
7	Meja Eselon IV	12	12
8	Meja Staf	45	100
9	AC	33	50
10	Komputer	37	37
11	Laptop	63	63
12	Filling Cabinet	38	38
13	Almari Arsip	25	40
14	Kendaraan Roda Empat	15	15
15	Sepeda Motor	21	21
16	LCD/Proyektor	10	10
17	Printer	53	53
18	Mesin Facimili	1	1

Sumber: Dislautkan DIY, 2017

Namun sarana dan prasarana aparatur ini belumlah berada pada kondisi ideal. Keadaan sarana dan prasarana ideal berdasarkan pada analisis kebutuhan terhadap jumlah pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY.

Telah dilakukan upaya untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur di Dinas Kelautan dan perikanan DIY, antara lain melalui kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor, Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan, Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan serta Pembangunan /Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor.

Sedangkan kondisi sarana dan prasarana aparatur di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut:

Tabel I.3 Kondisi Sarana dan Prasarana BPTPB

No	Nama Barang	Kondisi Riil	Kondisi Ideal
1	Kursi Eselon III	1	1
2	Kursi Eselon IV	4	4
3	Kursi staf	39	121
4	Meja Eselon III	1	1
5	Meja Eselon IV	4	4
6	Meja Staf	35	117
7	AC	18	20
8	Komputer	8	16
9	Laptop	17	20
10	Filling Cabinet	1	9
11	Almari Arsip	23	38
12	Kendaraan Roda Empat	5	9
13	Kendaraan Roda Tiga	4	4
14	Kendaraan Roda Dua	11	11
15	LCD/Proyektor	3	5
16	Printer	11	20
17	Mesin Facimili	0	1
18	Mesin tik Manual	14	14

Sumber: Dislautkan DIY, 2017

Berikut ini kondisi sarana dan prasarana aparatur di Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng:

Tabel I.4 Kondisi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng

No.	Nama Barang	Kondisi Riil	Kondisi Ideal
1	Kendaraan Roda 4	1	3
2	Kendaraan Roda 2	3	10
3	Genset	0	2
6	Kursi Eselon Iv	6	6
7	Meja Eselon Iv	6	6
8	Meja Eselon Iii	2	3
9	Kursi Eselon Iii	3	3
10	Pc Unit	15	20
11	Lap Top	12	15
12	Mesin Ketik	1	1
13	Kipas Angin	0	0
14	Filling Kabinet	19	19
15	Lemari Arsip	5	6
16	Rak Buku	0	3
17	Printer	16	20
18	Lcd	4	4
19	Mesin Pompa	11	11
20	Lemari Kaca	1	1
21	Lemari Kayu	3	3
22	Kursi Metal	26	26
23	Meja 1/2 Biro	1	1
24	Tempat Tidur Kayu	28	28
25	Meja Rapat	56	56
26	Kursi Rapat	136	136
27	Lemari Pakaian	24	24
28	Ac Unit	4	4
29	Antena SHF	1	1
30	Scaner	2	5
31	Meja Kerja Pengawai Non Struktural	4	4
32	Papan Pengumuman	2	2
33	Meja Makan	4	4
34	Televisi	9	9

35	Viewer	1	1
36	Camera Film	1	1
37	Meja Tulis	2	2
38	Kursi Tamu	4	4
39	Gordyn	70	70
40	Lemari Es	3	3
41	AC Split	17	17
42	Camera Digital	2	2
43	Megaphone	1	1
44	Peti Uang	1	1
45	Meja Kayu	15	15
46	Kursi Kayu	10	10
47	Meja Respsion	1	1
48	Meja Komputer	5	6
49	Sofa	15	15
50	Partisi Kantor	15	15
51	Partisi Ruangan Kantor	2	2
52	Jam Mekanis	8	8
53	Amplifier	1	1
54	Loudspeaker	2	2
55	Sound System	1	1
56	Microphone	3	3
57	Dispencer	6	6
58	Alat Pemadam/ Portable	2	4
59	Speaker Aktif Komputer	5	5
60	Ups	6	6
61	Layar Film	4	4
62	Pesawat Telephone	8	8
63	Facsimile	1	1
64	Dongkrak Kapal	3	3
65	Kasur	24	24
66	Bantal	70	70
67	Sprei	45	45
68	Mesin Potong Rumput	8	8
69	Kompor Gas	4	8
70	Alat Penanak Nasi	4	7
71	Tabung Gas	6	8

72	Tangga Alumunium	4	4
73	Server	1	1
74	D-Link	1	4
75	CCTV	1	1
76	Tiang AWS Monopole + Aksesoris	1	1
77	Lampu Sinyal Menara	1	1
78	Proteksi Petir	1	1
79	Power Distribution Board	1	1
80	Solar Panel	1	1
81	Barometer	1	1
82	Wind Sensor Set	1	1
83	Alat Ukur Kelembaban Dan Suhu Udara	1	1
84	Alat Ukur Curah Hujan	1	1
85	Pyranometer	1	1
86	Stasiun Cuaca Otomatis	1	1
87	Guling	25	25
88	Selimut Wool	25	25
89	Rak Piring	1	1
90	Alat Penarik Kapal	3	3

Sumber: Dislautkan DIY, 2017

I.5 Keuangan

Pada tahun 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan DIY mempunyai anggaran dari sumber APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Anggaran APBD terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, termasuk DAK (Dana Alokasi Khusus) dan Dana Keistimewaan (Danais). Sedangkan anggaran APBN terdiri dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ini bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang didsitribusikan melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya, Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaaan Sumberdaya Perikanan Budidaya, Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan serta Program Pengelolaan Ruang Laut.

Secara rinci jumlah anggaran yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan DIY sebagai berikut:

Tabel I.5 Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

SUMBER ANGGARAN	JUMLAH (RP)
➢ **APBD**	**47.210.232.686**
Belanja Tidak Langsung	8.484.235.113
Belanja Langsung	38.725.997.573
o APBD (tanpa DAK)	32.754.876.573
o DAK	5.047.831.000
o **Dana Keistimewaan**	**923.290.000**
▪ Tata Ruang	723.290.000
▪ Kebudayaan	200.000.000
➢ **APBN**	**2.193.010.000**
Dekonsentrasi	1.743.010.000
Tugas Pembantuan	450.000.000
Jumlah Total	**49.403.242.686**

Sumber: Dislautkan DIY, 2017

I.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKj IP/manfaat LKj IP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Potensi yang menjadi ruang lingkup OPD dan Sistematika penulisan LKj IP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB 2

Perencanaan & Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Perjanjian Kinerja Tahun 2017*
3. *Rencana Anggaran Tahun 2017*
4. *Instrumen Pendukung*

II.1 Perencanaan Strategis

Pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah DIY selama lima tahun terakhir menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, RPJMD 2012-2017 telah mengalami 2 (dua) kali perubahan. Evaluasi Pembangunan ini dilakukan pada tahun 2014 dan tahun 2015.

Perubahan pertama pada tahun 2014 disebabkan karena adanya beberapa indikator target sasaran yang capaiannya telah melampaui target yang ditetapkan pada akhir RPJMD. Hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dengan dilakukannya perubahan terhadap RPJMD 2012-2017 berdasarkan amanat Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017.

Kemudian perubahan kedua pada tahun 2015, disebabkan karena adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga diperlukan perubahan Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah,

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 menjadi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017.

Selaras dengan perubahan RPJMD 2012-2017 yang kedua menimbulkan konsekuensi logis adanya tindak lanjut dalam Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2012-2017, yang telah ditetapkan dalam SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Nomor 188/0606a tanggal 22 Januari 2016 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2012-2017. Perubahan perlu dilakukan untuk melakukan rasionalisasi terkait target kinerja sasaran, program dan kegiatan pendukung sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang sesuai dengan perubahan kedua. Hal ini sebagai penjabaran sasaran dan indikator Gubernur dalam perubahan RPJMD. Hasil perubahan RPJMD DIY Tahun 2012-2017 yang kedua akan digunakan sebagai panduan dalam menentukan program kegiatan dalam rencana kerja sampai dengan tahun akhir RPJMD. Perubahan yang dilakukan tercantum dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY.

II.1.1 Visi dan Misi

Terwujudnya Kelautan Dan Perikanan Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Kelautan dan Perikanan

  Masyarakat kelautan dan perikanan terdiri dari unsur masyarakat inti dan masyarakat pendukung. Masyarakat inti terdiri dari pelaku usaha budidaya ikan, nelayan, pengolah dan pemasar produk perikanan. Sedangkan masyarakat pendukung terdiri dari institusi perguruan tinggi, litbang, kelompok kerja, LSM dan pemerhati yang melakukan

kegiatan berhubungan dengan kegiatan bidang kelautan dan perikanan.

- Berdaya saing :

  Maju, tangguh, kreatif, inovatif, mutu/ kualitas, terampil, profesional, Dalam rangka membangun daya saing usaha masyarakat, Pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada kebutuhan pasar. Hasil dari tranformasi pemanfaatan sumberdaya lokal menjadi produk berupa barang/ jasa kelautan dan perikanan harus berorientasi pada pasar lokal maupun regional secara optimal dan berkelanjutan melalui kerjasama dunia usaha untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

- Berkelanjutan :

  Menjaga kelestarian Sumber Daya Ikan, konservasi, rehabilitasi ekosistem, pengawasan, berwawasan lingkungan

Misi:

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
2. Meningkatkan Dan Memelihara Daya Dukung Dan Kualitas Lingkungan Sumberdaya Kelautan Perikanan

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah salama 5 tahun anggaran adalah :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan

2. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan

Sasaran Strategis

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target tahunan					Keterangan
				2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor perikanan	PDRB sektor perikanan	Juta rupiah	-	-	-	-	-	Sebelum
				285.000	335.000	350.000	385.000	400.000	Sesudah
2	Meningkatnya konservasi dan pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Rasio luas kawasan lindung perairan	%	0,06	0,08	0,11	0,14	0,17	Sebelum
				0,06	0,08	0,11	0,14	0,17	Sesudah

❖ *Sumber: RENSTRA Reviu 2012-2017 Dinas Kelautan dan Perikanan DIY*

II.1.3 Strategi

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

II.1.3.1 Misi Meningkatkan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

- Strategi

  Penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, iptek dan pemberdayaan masyarakat
- Kebijakan

  Pengembangan budaya maritim dan penyiapan Sumberdaya Manusia kelautan yang berkualitas
- Program
  - Program Pengembangan Budidaya Perikanan
  - Program Pengembangan Perikanan Tangkap
  - Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
  - Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan
  - Program Peningkatan Kualitas SDM Dan Kelembagaan Dan Kelautan
- Kegiatan
  - Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya
  - Pelayanan dan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan
  - Pengembangan Sarana Prasarana Perbenihan (DAK)
  - Perbanyakan Induk, Benih Unggul dan Teknologi Perikanan
  - Pembinaan Perikanan Tangkap
  - Penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan
  - Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan
  - Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Penyuluhan Kelautan
  - Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
  - Pengembangan Budaya Bahari untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

II.1.3.2 Misi Meningkatkan dan Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

- Strategi

a) Percepatan rehabilitasi ekosistem dan cadangan SDA
b) Menciptakan kerjasama yang sinergis dengan instansi terkait

❖ Kebijakan

a) Perlindungan dan pelestarian sumberdaya kelautan perikanan
b) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan aparat

❖ Program

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim
- Rogam Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam
- Progam Pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan
- Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan

❖ Kegiatan

- Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
- Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi
- Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
- Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

- Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/ Operasional
- Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
- Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor
- Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi
- Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
- Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
- Mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
- Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- Wasdal SDI di PU dan Laut
- Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)

II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2017:

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor perikanan	PDRB sektor perikanan	Juta rupiah	400.000	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	400.000
2	Meningkatnya konservasi dan pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Rasio luas kawasan lindung perairan	%	0,17	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	0,17

Sumber: Dislautkan DIY, 2017

Catatan: Perhitungan target dan realisasi dihitung pada akhir tahun.

II.3 Rencana Anggaran Tahun 2017

Pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan DIY melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 47.210.232.686,-. dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 8.484.235.113,- dan Belanja Langsung Rp. 38.725.997.573,-. Belanja Langsung ini juga memuat Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 5.047.831.000,- dan Dana Keistimewaaan (Danais) sebesar Rp. 923.290.000,-

II.3.1 Target Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

Berikut disajikan target belanja beserta prosentasenya dari sumber anggaran APBD:

Tabel II.3 Target Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2017

Uraian	Target	Prosentase
Belanja Tidak Langsung	Rp. 8.484.235.113,-	17,97%
Belanja Langsung	Rp. 38.725.997.573,-	82,03%
Jumlah	Rp. 47.210.232.686,-	100,00%

Sumber: Dialautkan DIY, 2017

II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel II.4 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran (Rp)	Prosentase	Keterangan
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor perikanan	24.493.272.525	63,25	Sasaran ini didukung oleh 5 program dan 10 kegiatan
2	Meningkatnya konservasi dan pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	14.232.725.048	36,75	Sasaran ini didukung oleh 7 program dan 17 kegiatan

Sumber: E-monev Bappeda, 2017

II.4 Instrumen Pendukung

Instrumen pendukung berupa website yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, yaitu sebagai berikut:

Website Dinas Kelautan dan Perikanan DIY (http://dislautkan.jogjaprov.go.id)

Gambar II.1 Tampilan Website Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2016*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya*
4. *Akuntabilitas Anggaran*

III.1. Capaian Kinerja Tahun 2017

Dinas Kelautan dan Perikanan DIY telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tahun 2017 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis

Dinas Kelautan dan Perikanan DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/ KODE
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor perikanan	PDRB sektor perikanan	Juta rupiah	400.000	464.867,1	116,22	Sangat Baik
2	Meningkatnya konservasi dan pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Rasio luas kawasan lindung perairan	%	0,17	1,42	835,29	Sangat Baik

Sumber : E-monev Bappeda,2017

Dari tabel di atas, terdapat 2 (dua) indikator yang terbagi ke dalam 2 (dua) sasaran strategis. Pada tahun 2017, kedua indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar **100%** dari total indikator. Tidak ada indikator yang tidak memenuhi target. Capaian yang tertinggi pada indikator Rasio Luas Kawasan Lindung Perairan dengan persentase 835,29%.

III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:

III.2.1. Sasaran Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor perikanan.

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor perikanan terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu indikator: PDRB sektor perikanan (Juta Rupiah).

PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori (sektor) dari tahun ke tahun.

Tabel III.3 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1

No	Indikator	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2017 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PDRB sektor perikanan (juta rupiah)	-	400.000	464.867,1	116,22	400.000	116,22

Sumber : Dislautkan,2017

**realisasi tahun 2016, angka dari BPS*

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator yang dipergunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian daerah. Hal ini berarti peningkatan PDRB mencerminkan pula peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut.

PDRB dihitung atas dasar konsep arus barang, artinya perhitungan PDRB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Aliran konsep ini memungkinkan kita untuk membandingkan jumlah output yang dihasilkan pada tahun ini dengan tahun sebelumnya. Batas wilayah perhitungan PDRB adalah daerah (perekonomian domestik). Hal ini memungkinkan untuk mengukur sejauh mana kebijakan-

kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong aktivitas perekonomian domestik.

Pada tahun 2017 target PDRB sektor perikanan adalah 400.000 juta rupiah dan telah terealisasi 464.867.100 juta rupiah atau sebesar 116,22% dari targetnya. Digunakan realisasi PDRB tahun 2016, karena realisasi tahun 2017 belum *dipublish* oleh BPS. Angka PDRB tahun 2017 menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).

Indikator PDRB sektor perikanan merupakan indikator baru di tahun 2017 berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2012-2017, sehingga pada tahun 2016 belum digunakan/belum ada capaian jadi belum dapat diperbandingan capaian tahun 2016 dengan tahun 2017.

Namun demikian PDRB sektor perikanan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun seperti disajikan dalam grafik berikut ini:

Gambar III.1 PDRB Sektor Perikanan Tahun 2012-2016

Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicakup juga dalam kegiatan perikanan ini

adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.

Meskipun angka PDRB sektor perikanan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun namun peranan sektor perikanan dalam pembentukan PDRB di DIY cenderung menurun dari tahun ke tahun. Berikut disajikan tabel peranan lapangan usaha terhadap PDRB DIY kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan:

Tabel III.4 Peranan Lapangan Usaha Perikanan

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	88,33	88,34	87,47	87,48	87,60
Kehutanan dan penebangan kayu	8,19	7,94	4,17	4,15	4,06
Perikanan	3,48	3,72	4,17	4,15	4,06
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS DIY, 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa peranan sektor perikanan pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan cenderung menurun. Salah satu penyebab menurunnya peranan sektor perikanan adalah berkurangnya lahan dan lambatnya kenaikan harga produk perikanan dibandingkan produk lain.

Mungkin perlu ditambahkan adanya pergeseran struktur ekonomi DIY dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier terutama jasa dan perdagangan yang ditandai dengan turunnya pangsa semua sub sektor di sektor primer.

Bandingkan realisasi kinerja tahun berjalan dengan stadar nasional (jika ada) contoh standar SPM Nasional, MDGs atau nilai standar lainnya yang berlaku nasional

Faktor-faktor pendorong tercapainya target PDRB sektor perikanan antara lain adalah peningkatan produksi perikanan , baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap.

Pada tahun 2017 produksi perikanan mencapai 95.365,52 Ton. Terdiri dari produksi perikanan budidaya sebesar 88.550,18 Ton dan perikanan tangkap sebesar 6.815,34 Ton. Nilai produksi perikanan juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, seperti disajikan ada tabel berikut ini:

Tabel III.5 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan

Tahun	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)
2012	55,683.93	850,299,798
2013	62,897.27	1,041,326,296
2014	71,960.99	1,335,969,356
2015	74,705.24	1,417,009,418
2016	81,876.80	1,627,339,093
2017	95,365.52	1,895,433,672

Sumber : Dislautkan,2017

Meningkatnya produksi perikanan yang juga diikuti oleh meningkatnya nilai produksi perikanan akan berdampak pada meningkatnya pendapatan pembudidaya ikan dan nelayan. Peningkatan pendapatan ini juga berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor perikanan. Berikut disajikan grafik produksi perikanan disandingkan dengan PDRB Sektor Perikanan di DIY selama 2012-2017:

Gambar III.2 Produksi dan PDRB sektor perikanan

Program yang mendukung tercapainya target PDRB sektor perikanan adalah Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan. Berikut disajikan tabel Capaian Anggaran Pendukung Sasaran:

Tabel III. 6 Capaian Anggaran Pendukung Sasaran 1

Program	Keuangan		
	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	11,381,574,300	10,386,086,900	91.25
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	7,230,868,350	6,254,193,800	86.49
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	4,652,659,875	4,336,072,908	93.20
Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan	1,028,170,000	938,855,096	91.31
Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan dan Kelautan	200,000,000	195,625,000	97.81
Total	**24,493,272,525**	**22,110,833,704**	**90.27**

Sumber: E-monev Bappeda, 2017

Dari tabel Capaian anggaran pendukung sasaran Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor perikanan terlihat bahwa rata-rata capaian anggaran sebesar 90,27%. Capaian anggaran tertinggi pada program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, yaitu sebesar 93,20% dan capaian anggaran terendah pada program Pengembangan perikanan tangkap, yaitu 86,49%. Semua program pendukung sasaran ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga indikator PDRB sektor perikanan dapat mencapai target.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi perikanan adalah

Permasalahan dan kendala yang masih ditemui dalam pencapaian indikator ini adalah

Rencana Aksi penyelesaian masalah adalah

Indikator PDRB sektor Perikanan dan sasaran Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor perikanan dapat disimpulkan **berhasil** karena capaiannya **≥ 100%**.

Foto

III.2.2. Sasaran Meningkatnya konservasi dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya konservasi dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu indikator: Rasio luas kawasan lindung perairan (%).

Kawasan lindung perairan atau kawasan konservasi perairan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/MEN/2010 adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Tabel III.7 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2

No	Indikator	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2017 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rasio luas kawasan lindung perairan (%)	1,42	0,17	1,42	835,29	0,17	835,29

Sumber : Dislautkan,2017

Indikator rasio luas kawasan lindung perairan dengan target tahun 2017 sebesar 0,17% telah tercapai 1,42% atau telah melebihi sebesar 835,29% dari targetnya.

Capaian tahun 2017 ini sama dengan capaian pada tahun 2016. Hal ini dikarenakan tidak ada lagi penambahan kawasan lindung perairan yang ada di DIY. Kawasan lindung perairan di DIY terdapat di Kabupaten Gunungkidul, yaitu di Wediombo dan di Kabupaten Bantul, yaitu di Patehan dan Baros.

Kawasan lindung perairan di DIY telah tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 271/KPTS/2013 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Gunungkidul tanggal 2 September 2013 dan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 284 Tahun 2014 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul tanggal 28 April 2014.

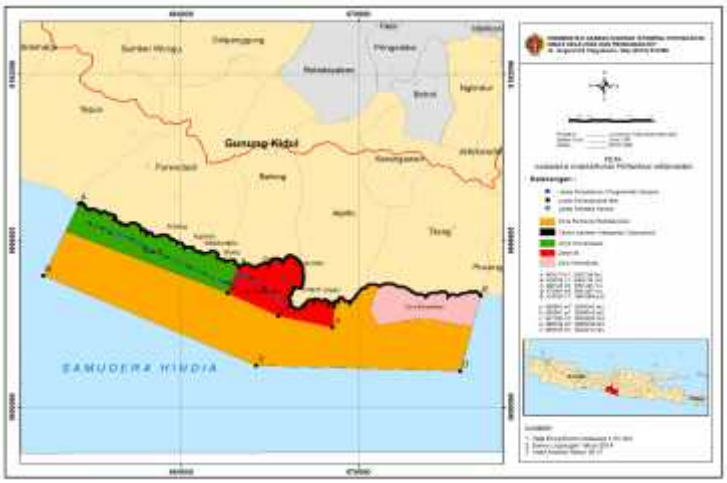

Gambar III.3 Peta Zonasi Kawasan Konservasi Wediombo

Pencadangan kawasan konservasi Kabupaten Gunungkidul berlokasi di perairan Wediombo, terdiri dari 192,79 Ha kawasan daratan dan 3.195,67 Ha kawasan perairan dengan total luas 3.388,46 Ha.

Gambar III.4 Peta Kawasan Konservasi Penyu Kabupaten Bantul

Sedangkan kawasan konservasi Kabupaten Bantul berupa kawasan konservasi Taman Pesisir yang terdiri dari Kawasan Konservasi Penyu, seluas 50 Ha di Patehan, Gadingsari, Sanden dan Kawasan Konservasi Mangrove, seluas 132 Ha di Baros, Tirtohargo, Kretek. Sehingga total luas kawasan konservasi di DIY adalah 3.570,46 Ha.

Gambar III.5 Peta Kawasan Konservasi Mangrove Kabupaten Bantul

Rasio luas kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan total pada tahun 2017 sebesar 1,42 melebihi dari target tahun 2017 sebesar 0,17 (capaian tahun 2016 sebesar 835,29% dari target). Rasio luas kawasan lindung perairan terhadap total luas

perairan total pada tahun 2017 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2016 adalah tetap.

Pada awal perencanaan hanya mengalokasikan 420 Ha untuk luas kawasan konservasi, namun seiring berjalannya waktu ternyata kawasan konservasi di DIY yang telah ditetapkan melalui SK Bupati Gunungkidul dan Bantul seluas 3.570,46 Ha. Adapun perhitungan rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total sebagai berikut :

Luas perairan teritorial : 250.860 ha

Target luas kawasan lindung perairan : 420 ha

Realisasi luas kawasan lindung perairan tahun 2017 : 3570,46 ha

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Realisasi luas kawasan lindung perairan}}{\text{Luas perairan total}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio} = \frac{3570{,}46}{420} \times 100\%$$

$$= 1{,}42\%$$

Target luas kawasan lindung perairan tahun 2017 : 7 ha

$$\text{Rasio} = \frac{7}{420} \times 100\%$$

$$= 0{,}017\%$$

Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan total pada tahun 2017 telah mencapai 835,29% dari target akhir RPJMD 2012-2017.

Bandingkan realisasi kinerja tahun berjalan dengan stadar nasional (jika ada) contoh standar SPM Nasional, MDGs atau nilai standar lainnya yang berlaku nasional

Faktor pendukung sasaran Pengelolaan konservasi kawasan berkelanjutan meningkat adalah telah dilakukannya Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Gunungkidul dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 271/KPTS/2013 Tanggal 2 September 2013 dan Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Bantul dengan Surat Keputusan Bupati Bantul No 284 tahun 2014 tentang pencadangan kawasan taman pesisir di Kabupaten Bantul tanggal 28 April 2014.

Berikut disajikan tabel Capaian Anggaran Pendukung Sasaran Meningkatnya konservasi dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Tabel III.8 Capaian Anggaran Pendukung Sasaran 2

Program	Keuangan		
	Pagu	Realisasi	%Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.750.644.798	3.447.881.161	91,93
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.270.980.400	7.011.383.029	96,43
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	531.365.700	527.917.925	99,35
Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim	315.420.000	309.901.000	98,25
Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam	1.375.887.000	998.059.500	72,54
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	265.137.150	248.704.650	93,80
Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan	723.290.000	706.650.000	97,70
JUMLAH	**14.232.715.048**	**13.250.497.265**	**93,10**

Sumber: E-monev Bapeda, 2017

Dari tabel Capaian anggaran pendukung sasaran Meningkatnya konservasi dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terlihat bahwa capaian anggaran rata-rata mencapai 93%. Dengan capaian tertinggi pada program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar 99,35% dan capaian terendah pada program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam sebesar 72,54%.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator luas kawasan lindung perairan adalah

Permasalahan dan kendala yang masih ditemui dalam pencapaian indikator ini adalah

Rencana Aksi penyelesaian masalah adalah

Foto

III.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

Di luar IKU, pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY juga ditunjukkan oleh target pencapaian kinerja dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Secara rinci disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel III.9 Indikator Kinerja dari Kementerian Kelautan dan Perikanan

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	nilai	102	100,80	98,82
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	nilai	110	116,68	106,07
Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	88.500	88.550,183	100,06
Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	8.400	6.815,34	81,14
Nilai AKIP	nilai	90	90	100,00
Nilai Kinerja Anggaran	%	80	99,08	123,85

Sumber: Dislautkan DIY, 2017

Dari 6 (enam) indikator kinerja, terdapat 4 (empat) indikator yanng capaiannnya ≥100%, yaitu indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN), Jumlah produksi perikanan budidaya, Nilai AKIP dan Nilai Kinerja Anggaran. Sementara itu 2 (dua) indikator yang belum mencapai 100% adalah Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) dan Jumlah produksi perikanan tangkap. Indikator dengan capaian tertinggi adalah Nilai Kinerja Anggaran dengan capaian 123,85% dan indikator dengan capaian terendah adalah Jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 81,14%.

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli pembudidaya dan nelayan di pedesaan. Semakin tinggi nilai NTPi atau NTN maka akan relatif semakin kuat pula tingkat

kemampuan daya belinya. Dari kedua indikator tersebut realisasi Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) sebesar 100,80 atau 98,82% dari targetnya dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 116,68 atau 116,68% dari targetnya. Realisasi kedua indikator ini berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 temasuk sangat baik.

Pada indikator jumlah produksi perikanan budidaya dengan realisasi mencapai 100,06% dan jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 81,14%. Beberapa faktor penghambat tidak tercapainya target produksi perikanan tangkap adalah…….

Indikator Nilai AKIP dan Nilai Kinerja Anggaran dengan capaian sebesar 100% dan 123,85% dari targetnya termasuk sangat baik. Faktor pendorong tercapainya kedua indikator ini adalah perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan dengan baik serta adanya pengendalian dan monitoring evaluasi pada pelaksanaan program/kegiatan.

Berikut disajikan tabel Skala peringkat kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 untuk indikator dari KKP:

Tabel III.10 Skala Nilai Peringkat Kinerja Indikator KKP 2017

Indikator	% Realisasi	Kriteria/ Kode
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	98,82	Sangat Baik
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	106,07	Sangat Baik
Jumlah produksi perikanan budidaya	100,06	Sangat Baik
Jumlah produksi perikanan tangkap	81,14	Tinggi
Nilai AKIP	100,00	Sangat Baik
Nilai Kinerja Anggaran	123,75	Sangat Baik

Sumber: Dislautkan DIY, 2017

III.4 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 91,31 %. dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 89,69%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 95,10%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada

program/kegiatan di sasaran Meningkatnya konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (93,10%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor perikanan (90,27%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2017 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2017

Sasaran	Indikator	Kinerja			Program	Keuangan		
		Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor perikanan	PDRB sektor perikanan	400.000	464.867,1	116,22	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	11.381.574.300	10.386.086.900	91,25
					Program Pengembangan Perikanan Tangkap	7.230.868.350	6.254.193.800	86,49
					Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	4.652.659.875	4.336.072.908	93,20
					Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan	1.028.170.000	938.855.096	91,31
					Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan dan Kelautan	200.000.000	195.625.000	97,81
Meningkatnya konservasi dan pengawasan	Rasio luas kawasan lindung	0,17	1,42	835,29	Program Pelayanan Administrasi	3.750.644.798	3.447.881.161	91,93

sumberdaya kelautan dan perikanan	perairan				Perkantoran			
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.270.980.400	7.011.383.029	96,43
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	531.365.700	527.917.925	99,35
					Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim	315.420.000	309.901.000	98,25
					Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam	1.375.887.000	998.059.500	72,54
					Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	265.137.150	248.704.650	93,80
					Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan	723.290.000	706.650.000	97,70
Jumlah Total Belanja Langsung						**38.725.997.573**	**35.361.330.969**	**91,31**

Sumber: E-monev Bappeda. 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian realisasi kinerja untuk dua indikator tergolong sangat baik. Capaian realisasi anggaran juga tergolong baik. Total capaian realisasi kinerja sebesar 91.31% atau Rp. 35.361.330.969.-

Tabel III.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Program Tahun 2017
(yang mendukung capaian sasaran strategis)

No	Program	Anggaran*			Keterangan
		Target	Realisasi	% Deviasi	
1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	11.381.574.300	10.386.086.900	8,75	Sisa anggaran merupakan sisa lelang
2	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	7.230.868.350	6.254.193.800	13,51	Sisa anggaran merupakan sisa lelang dan adanya efisiensi biaya pelatihan
3	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	4.652.659.875	4.336.072.908	6,8	Sisa anggaran merupakan sisa lelang dan efisiensi perjalanan
4	Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan	1.028.170.000	938.855.096	8,69	Sisa anggaran merupakan sisa lelang
5	Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan dan Kelautan	200.000.000	195.625.000	2,1	Sisa anggaran merupakan efisiensi biaya BBM
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.750.644.798	3.447.881.161	8,07	Sisa anggaran merupakan efisiensi listrik. air dan telepon
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.270.980.400	7.011.383.029	3,57	Sisa anggaran merupakan sisa lelang

8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	531.365.700	527.917.925	0,65	Sisa anggaran merupakan efisiensi biaya penggandaan
9	Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim	315.420.000	309.901.000	1,75	Sisa anggaran merupakan efisiensi
10	Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam	1.375.887.000	998.059.500	27,46	Sisa anggaran merupakan sisa lelang
11	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	265.137.150	248.704.650	6,20	Sisa anggaran merupakan efisiensi belanja BBM
12	Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan	723.290.000	706.650.000	2,30	Sisa anggaran merupakan efisiensi honor
Jumlah Total Belanja Langsung		**38.725.997.573**	**35.361.330.969**	**8,69**	

*** anggaran setelah APBD perubahan Analisa Efisiensi**

Pada Program Pengembangan Budidaya Perikanan deviasi antara realisasi dan target sebesar 8,75%. Deviasi ini karena adanya sisa lelang pada kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana perbenihan (DAK) sebesar Rp. 735.847.500. belanja hibah barang/jasa pada kegiatan Pengelolaan produksi perikanan budidaya sebesar Rp. 132.320.500.-

Deviasi pada Program Pengembangan Perikanan Tangkap sebesar 13,51% merupakan sisa lelang pada kegiatan Penyelenggaraan pelabuhan perikanan sebesar Rp. 650.257.000.- dan efisiensi biaya pelatihan karena BPPP Tegal sebagai mitra pelatihan menerapkan PP nomor 75 tahun 2015.

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dengan deviasi 6,8% merupakan sisa lelang kegiatan Pengolahan dan pemasaran produk perikanan untuk alat perlengkapan Rp. 64.648.000.-. makanan dan minuman harian umum Rp. 74.394.000.- serta efisiensi perjalanan dinas .

Deviasi pada Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan sebesar 8,69% adalah adanya sisa lelang kegiatan Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (bersih pantai).

Selanjutnya pada Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan dan Kelautan (Danais) dengan deviasi 2,19% merupakan efisiensi biaya BBM.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran deviasi sebesar 8,07% karena efisiensi pembayaran listrik. air dan telepon. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur deviasi 3,57% karena sisaa lelang kegiatan Pembangunan/rehabilitasi rumah dan gedung kantor dan kegiatan Pengadaan/rehabilitasi kendaraan dinas/operasional. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan deviasi 0,65% karena adanya efisiensi biaya penggandaan.

Pada Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim deviasi sebesar 1,75%. sisa anggaran merupakan efisiensi biaya perjalanan dinas dan belanja cetak. Deviasi pada Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam 27,46% . Sisa anggaran merupakan sisa lelang jasa konsultasi Rp. 345.217.500.-.

Pada Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan deviasi sebesar 6,2% karena efisiensi pembelian BBM yang disesuaikan dengan harga pasar pada saat kegiatan dilaksanakan. Pada Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan (Danais) deviasi 2,3% karena efisiensi biaya honor tim pelaksana kegiatan.

Analisa Efisiensi

Berikut disajikan tabel analisa efisiensi untuk indikator kinerja sasaran yang capaiannya ≥100%

Tabel III. 11 Analisa Efisiensi Indikator Kinerja Sasaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>=100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor perikanan	PDRB sektor perikanan	116,22	90,27	9,73
2	Meningkatnya konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Rasio luas kawasan lindung perairan	835,29	93,10	6,90

Sumber: E-monev Bapeda. 2017

Realisasi penyerapan anggaran program/ kegiatan yang mendukung sasaran Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor perikanan sebesar 90,27% dengan capaian kinerja mencapai 116,22%. Ini berarti bahwa output tercapai dengan input tyang lebih rendah. atau terdapat efisiensi penggunaaan anggaran sebesar 9,73%.

Sedangkan pada sasaran Meningkatnya konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan realisasi penyerapan anggaran sebesar 93,10% dengan capaian kinerja mencapai 835,29%. Artinya bahwa output tercapai dengan input yang lebih rendah. atau telah terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 6,90%.

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Saran*

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY pada Tahun Anggaran 2017 merupakan tahun ke-5 dari Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2012-2017. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu. untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis dua sasaran terdapat dua indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2017 dua indikator tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100% dari total indikator. Tidak ada indikator yang belum memenuhi target.
2. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor. antara lain sumberdaya manusia. anggaran dan sarana prasarana.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran**/**Rencana Aksi sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi
2. Pengelolaan kawasan konservasi
3. Pendanaan berbasis kinerja. money follow fungtion

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

LAMPIRAN:

Lampiran 1. Struktur Organisasi

Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya

Lampiran 5. Penghargaan yang pernah diterima

Lampiran 6. .....

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan Sagan Nomor III/4 Telepon (0274) 512386 Faksimili (0274) 560386
Website : http://www.dislautkan.jogjaprov.go.id Email : dislautkan@jogjaprov.go.id
Kode Pos 55223

TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKJ IP TAHUN 2016

Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Mempertahankan/meningkatkan kinerja yang telah dicapai, yaitu pada Aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja	.....
2.	Melakukan upaya perbaikan pada aspek Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi, meliputi capaian kinerja *output*, *outcome*, kinerja utama dan kinerja dari penilaian *stakeholder*	.....

Kepala
Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

Ir. Bayu Mukti Sasongka, M.Si
NIP. 19641103 199102 1 001